

**SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN PEGAWAI PADA
KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)

Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya



Oleh

TAUFIQ WHISAL ALHARITS HUTASUHUT

2019/19133085

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

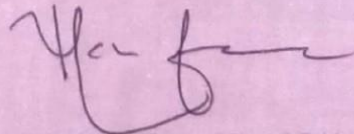
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**SISTEM INFORMASI PENGAJIAN PEGAWAI PADA KANTOR WILAYAH
AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Nama : Taufiq Whisal Alharits Hutasuhut
Nim : 19133085
Departemen/Prodi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

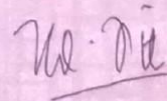
Padang, 09 Juni 2023

Diketahui Oleh :
Koordinator Prodi D III Akuntansi



Halkadri Fitra, S.E., MM.Ak
NIP 19800809 201012 1 003

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing



Dr. Nelvirita, S.E., M.Si.AK
19740706 199903 2 002

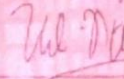

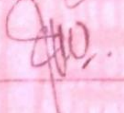
PENGESAHAN TUGAS AKHIR
SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN PADA PEGAWAI KANTOR WILAYAH AGRARIA
DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : Taufiq Whisal Alharits Hutasuhut
Nim : 19133085
Departemen/Prodi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Dituji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Diploma
D III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*

Padang, 09 Juni 2023

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Nelvirita, S.E., M.SIAK (Ketua)	
2. Ery Mulyani, S.E., M.Si.Ak (Anggota)	
3. Dewi Pebriyani, S.E., M.Si (Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufiq Whisal Alharits Hutasuhut
Thn. Masuk/NIM : 2019/ 19133085
Tempat/Tgl. Lahir : Sitinjak/ 23 Januari 2002
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda No.114 Kel. Gambir Baru Kec. Kisaran Timur Provinsi Sumatera Utara
Judul Tugas Akhir : **SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN PEGAWAI PADA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT.**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 09 Juni 2023
Yang menyatakan,



Taufiq Whisal Alharits Hutasuhut
NIM. 19133085

ABSTRAK

Taufiq Whisal Alharits : Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Pada Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat

Pembimbing : Nelvirita, S.E., M.Si.Ak

Masalah penelitian ini adalah diduga besarnya tingkat pelayanan yang dilaksanakan oleh pegawai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem akuntansi penggajian pada Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat.

Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif yang didasari oleh laporan keuangan penggajian Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2023 di Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa sistem akuntansi penggajian pada Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat sudah digolongkan efektif dinilai dari aspek laporan yang dihasilkan dan sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN tentang sistem penggajian pegawai dan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2014 perihal penggajian pada pegawai negeri sipil.

Kata Kunci : Sistem Akuntansi Penggajian pada Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.

KATA PENGANTAR



Pertama sekali penulis mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua khususnya, kepada penulis karena dengan kehendaknya penulis telah dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Pada Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat”**.

Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya program studi Diploma III di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terima kasih kepada kedua orang tua, papa tercinta Darmendra Hutasuhut, mama tercinta Mardia Harahap yang telah terus memberi dukungan lahir dan batin kepada penulis sehingga penulis sampai pada tahap ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik tersayang Khoirul Rizky Alharits Hutasuhut selaku orang tersayang yang telah membantu dalam pembuatan tugas akhir ini serta keluarga besar penulis lainnya yang tetap mendukung dan menyemangati penulis sampai saat ini. Dalam proses perkuliahan hingga proses penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak menerima dukungan moril dan materil dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Dr. Marwan, S.Pd, M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Abror, SE, M.E. Ph.D selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Yulhendri, S.Pd, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Halkadri Fitra, S.E., MM, Ak, CA selaku Ketua Prodi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Nelvirita, S.E., M.Si.Ak selaku pembimbing tugas akhir yang selalu memberikan arahan, ide-ide, masukan, motivasi serta pencerahan dalam mewujudkan penulisan tugas akhir ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik, semoga ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
5. Ibu Helga Nuri Honesty, S.E., M.Acc.,Akt selaku pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengarahkan saya sejak awal perkuliahan, baik berupa saran dan motivasi yang sangat membantu.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama di perkuliahan serta kepada pegawai-pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang mana telah membantu penulis dalam berbagai hal menyangkut perkuliahan.
7. Pustakawan/wati Universitas Negeri Padang.
8. Bapak Kakanwil Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat yang memberikan izin penulis untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tugas akhir ini.

9. Terima kasih kepada Keluarga Besar H. Amaro Harahap yang telah memberikan dorongan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Keluarga Imatapsel Pasid-Padang yang telah menjadi keluarga baik dalam kesulitan maupun kebahagiaan selama berada di padang.
11. Keluarga Batak's House yang telah menjadi keluarga serumah yang menerima dalam segala perbuatan baik tindakan maupun perbuatan.
12. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi 2021-2022 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
13. Serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dan telah membantu dan terus memberi dukungan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan baik dari isi maupun dari cara penyajian sehingga jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis dengan hati yang terbuka menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dengan harapan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi penulis khususnya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Padang, 20 Februari 2023

Penulis

Taufiq Whisal Alharits Hutasuhut

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	4
C.Tujuan Penelitian.....	5
D.Manfaat Penelitian.....	6
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA	8
A.Sistem Informasi Akuntansi	8
B.Sistem Informasi Akuntansi Penggajian	14
C.Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi Penggajian.....	16
D. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	23
E. Sistem dan Prosedur Pengeluaran dan Penggajian Pemerintah Daerah ..	28
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Bentuk Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34

C. Rancangan Penelitian.....	35
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A.Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat	39
B.Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat	51
BAB V.....	64
KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.....	44
Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional.....	44
Gambar 4.2.....	50
Struktur Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat.....	50
Gambar 4.3.....	61
Perhitungan Gaji Pegawai.....	61
Gambar 4.4.....	63
Flowchart Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.....	63

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di Indonesia yang terjadi saat ini, menjadikan sistem informasi akuntansi sebagai suatu keharusan, karena sangatlah penting dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya fisik dan unsur-unsur untuk mengubah data ekonomi menjadikan informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dapat membantu kegiatan pokok tidak hanya pada sektor privat (perusahaan) tetapi juga pada sektor publik (pemerintahan), salah satunya sistem penggajian. Oleh karena itu, sektor publik membutuhkan sistem informasi akuntansi untuk membantu pelayanan publik pada masyarakat agar lebih efektif dan efisien.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penentu dalam kegiatan penggajian sektor publik dan mempunyai peranan yang besar didalam pencapaian suatu kinerja. Sumber daya manusia diartikan sebagai pengelola dan pelaksana yang dipercaya dalam melaksanakan tugas maupun kegiatan yang berkaitan dengan sektor publik. Berbicara mengenai pegawai, sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek kuantitas dan kualitas. Aspek kuantitas dapat dilihat dari jumlah pegawai yang diperlukan, sedangkan dari aspek kualitas mencakup kemampuan pegawai baik fisik dan non fisik seperti dalam hal kecerdasan dan mental dalam melakukan pekerjaan. Oleh karenanya, membutuhkan usaha yang terus-menerus untuk mencari, memilih, dan melatih calon pegawai atau pegawai. Sebaliknya, pegawai membutuhkan sektor publik

sebagai tempat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, pegawai berhak mendapatkan gaji yang sesuai dengan kualitas kinerjanya.

Sistem penggajian merupakan salah satu kegiatan pokok sistem informasi akuntansi yang dirancang untuk menangani perhitungan gaji dan pembayaran pada pegawai. Sistem penggajian sektor publik dilakukan dengan adanya campur tangan dari pemerintah, sehingga diharuskan bagi setiap sektor publik untuk mematuhi peraturan pemerintah mengenai sistem penggajian. Penggunaan sistem penggajian yang baik memerlukan pegawai untuk menangani perhitungan gaji dan menerima gaji sesuai peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan gaji, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui salah satunya yaitu gaji yang merupakan bentuk kompensasi atas prestasi ataupun kinerjanya pegawai yang finansial dan menimbulkan kepuasan kerja, serta diberikan pemberi kerja pada pegawai berkenaan dengan penggunaan tenaga manusia. Oleh karena itu, dengan munculnya kepuasan kerja dari pegawai sehingga setiap pegawai dapat meningkatkan motivasi dalam bekerja dan menciptakan kualitas dalam berkinerja.

Sistem akuntansi penggajian adalah fungsi, dokumen, catatan, dan pengendalian internal yang digunakan untuk kepentingan dan sebagai penyedia informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja (Mulyadi, 2001). Apabila sektor publik yang memiliki sistem penggajian yang baik, maka diharapkan sektor publik memiliki praktek yang sehat seperti: absensi jam hadir yang dibandingkan dengan absen kerja yang dipakai sebagai dasar distribusi tenaga kerja, pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungan oleh fungsi

akuntansi sebelum dilakukan pembayaran, perhitungan pajak penghasilan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan pegawai yang disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji pegawai (Mulyadi, 2001).

Pada umumnya penggajian merancang dan melaksanakan administrasi gaji pegawai, dan memerlukan sistem penggajian yang baik. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu organisasi sektor publik yang telah lama berdiri yang dibentuk memiliki tugas pelayanan di bidang tata ruang dan di bidang pertanahan. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat memiliki pegawai yang cukup untuk melayani masyarakat setiap harinya. Tingginya bentuk pelayanan yang harus diberikan mengakibatkan kinerja pegawai yang cukup berat dan peningkatan belanja pegawai yang harus dipenuhi, terlihat pada gaji yang dikeluarkan setiap bulan dan kenaikan gaji pada tahun 2014 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan PP nomor 34 tahun 2014 mengenai “Gaji Pegawai Negeri Sipil”. Bagi Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tingkat pelayanan yang tinggi di Provinsi Sumatera Barat, tentunya masalah penggajian merupakan salah satu prioritas utama. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat membutuhkan sistem penggajian yang baik dalam pengelolaan gaji yang dilakukan, agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian gaji pegawai yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan sistem penggajian yang baik dapat mencegah terjadinya penyelewengan dan tidak terjadi kecurangan-kecurangan

yang merugikan, serta penerapan sistem penggajian secara baik dapat meningkatkan kinerja pegawai.

Atas dasar hal tersebut dan pentingnya sistem informasi akuntansi dalam setiap kegiatan operasional khususnya pada penggajian yang dilakukan pada setiap organisasi sektor publik. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji "*Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat*".

B. Rumusan Masalah

Sistem informasi akuntansi penggajian pegawai sangatlah penting yaitu untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan terhadap gaji yang dapat merugikan organisasi sektor publik berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis mengemukakan rumusan masalah bagaimana sistem akuntansi penggajian pegawai ditetapkan oleh Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Komponen sistem penggajian apa saja yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat ?
2. Apa saja karakteristik informasi akuntansi penggajian pada Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat ?
3. Dokumen-dokumen apa saja yang dipakai dalam sistem akuntansi penggajian pegawai pada Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat ?

4. Catatan-catatan apa saja yang dipakai dan laporan apa yang dihasilkan oleh sistem penggajian pada Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat ?
5. Apa saja fungsi yang terkait dengan penggajian pada Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat ?
6. Bagaimana prosedur perhitungan gaji yang digunakan oleh Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat ?
7. Apakah pelaksanaan sistem informasi akuntansi penggajian pada Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat sudah andal ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui komponen sistem penggajian apa saja yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui apa saja karakteristik informasi akuntansi penggajian pada Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mendapatkan dokumen-dokumen apa saja yang dipakai dalam sistem akuntansi penggajian pegawai pada Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.

4. Untuk mendapatkan catatan-catatan apa saja yang dipakai dan laporan apa yang dihasilkan oleh sistem penggajian pada Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.
5. Untuk mengetahui fungsi-fungsi apa saja yang terkait dengan sistem penggajian pada Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.
6. Untuk mengetahui perhitungan gaji yang digunakan oleh Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.
7. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem informasi akuntansi penggajian pada Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat sudah andal .

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan untuk mengamati dalam penulisan Tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan peneliti mengenai penggajian pegawai serta sebagai pembanding antara teori yang peneliti dapatkan dalam semasa perkuliahan dengan didunia kerja yang sesungguhnya.

2. Bagi Pihak Instansi

Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dapat menggunakan penelitian sebagai masukan untuk penyempurnaan terhadap sistem akuntansi dalam mengembangkan sumber daya manusia dan dapat digunakan sebagai referensi mengenai sistem

informasi akuntansi terhadap penggajian pegawai terhadap instansi pemerintahan.

3. Bagi Pembaca

Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai sistem informasi akuntansi penggajian dan dijadikan bahan rujukan atau referensi yang membutuhkan informasi tentang sistem informasi akuntansi penggajian dan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tugas akhir ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Sistem informasi akuntansi penggajian di Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa komponen termasuk para pegawai, bagian keuangan yang mengoperasikan sistem dan melaksanakan beberapa fungsi, melalui prosedur-prosedur dalam mengumpulkan, memproses dan menyimpan data keuangan dan lainnya. Dengan menggunakan software GPP-SATKER yang dioperasikan melalui komputer.
2. Sistem informasi akuntansi penggajian di Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik sebagai berikut: disajikan informasi dalam bentuk data penggajian yakni beberapa gaji pokok, tunjangan, dan potongan. sudah terhindar dari kesalahan melalui penyusunannya diproses sesuai dengan PP, sudah terhindar dari kesalahan dan telah terverifikasi.
3. Sistem informasi akuntansi penggajian yang merupakan dokumen pendukung gaji seperti: SK kenaikan pangkat/ golongan, mutasi, dan skorsing yang disesuaikan dengan PP No. 9 Tahun 2020. Daftar gaji yang dimuat dalam bentuk ampra gaji dan didalamnya telah disesuaikan dengan

peraturan pemerintah mengenai gaji pokok dan tunjangan kinerja. Dan dokumen surat perintah membayar yang digunakan untuk alat untuk pembayaran gaji dan dimuat sebagai bukti kas keluar.

4. Catatan dan laporan yang digunakan berupa buku kas untuk mencatat transaksi keuangan yang berhubungan dengan penggajian yaitu dokumen mengenai penghasilan dan potongan serta tunjangan pegawai yang menghasilkan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai.
5. Sistem informasi akuntansi penggajian memiliki fungsi yang terkait yaitu fungsi pegawai, fungsi pencatat waktu, fungsi pembuat daftar gaji dan fungsi akuntansi serta fungsi keuangan yang bertanggung jawab atas penggajian pegawai pada Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.
6. Prosedur perhitungan gaji pegawai pada sistem penggajian sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, dan tentunya efektif dan juga digunakan oleh Sistem informasi akuntansi penggajian untuk para pegawai yang disajikan oleh Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.
7. Sistem informasi akuntansi penggajian yang disajikan di Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan secara andal yaitu dalam bentuk flowchart dengan dilakukannya proses pelaporan data pegawai dan pelaksanaan presensi melalui fingerprint oleh pegawai yang dikelola oleh kepegawaian untuk dilakukannya proses input data pegawai dan hasil presensi yang digunakan

oleh keuangan dalam pembuatan ampra gaji melalui aplikasi SAKTI sampai terbitnya SPM, kemudian untuk dilaporkan kepada KPPN untuk penerbitan SP2D untuk dilakukannya validasi atas SP2D untuk disetujui dan dilaporkan kepada bank, sehingga dilakukannya pembayaran gaji dan pembuatan daftar gaji pegawai untuk dilaporkan kepada bidang keuangan dan disajikan dalam bentuk laporan penggajian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan beberapa saran kepada pihak manajemen pada Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Sistem informasi akuntansi penggajian di Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat sudah lengkap, sebaliknya dipertahankan dan bila perlu di tingkatkan.
2. Sistem informasi akuntansi penggajian mengenai pembayaran gaji telah tepat waktu, mengingat waktu yang telah ditentukan dalam pembayaran gaji. Hal ini tentunya dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi sehingga kesejahteraan pegawai dapat bertahan lama sehingga kinerja pegawai akan meningkat pula.
3. Sistem informasi akuntansi penggajian dilaksanakan secara andal, mengingat pencapaian yang telah didapatkan oleh Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat untuk lebih dipertahankan dan ditingkatkan agar pencapaian lebih maksimal.

4. Sistem informasi akuntansi penggajian yang telah diterapkan pada Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat tetap dipertahankan dan dimaksimalkan dalam penilaian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, M. N. (2019). Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi i Badan Pertanahan Nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 476-492.
- Bastian, I. (2019). *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. Lingkup Akuntansi Sektor Publik.
- Costari, N. (2022). *Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan*.
- DelantySAR, A. (2015). *Sistem Penggajian pada Sektor Publik (Studi Kasus pada Dinas Pendidikan Kota Malang (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)*.
- Hermelinda,T.U. (2021). Analisis Penerapan Ssistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. Lancar Abadi Sekawan . 49-54.
- Idrison, I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Dalam Penerapan Tarif Pajak Negara bukan Pajak Pada Kegiatan Pertanahan *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(3), 268-281.
- Waridin, N. I. (2015). *Kajian Pembebanan Tugas Ganda yang Dilaksanakan Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Tomohon (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Manado)*.
- Keuangan,B.P.K.(2021,may).*databaseperaturanbpk*.From <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/210582/permen-agrariakepala-bpn-no-2-tahun-2020>.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi* . jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi Penggajian* . Jakarta: Salemba Empat.
- Nomor, P. P. (58). Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah..
- Nomor, P. M. D. N. (55). Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaianya.
- Putri, R. J. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*.
- Sugiyono. (2013). metode penelitian. *analisis jurnal menggunakan metode deskriptif* .
- Sudaryono, E. A., & Setiawan, D. (2015). Manajemen Laba dan Penerapan UU No. 36/2008 tentang Perubahan Penghitungan Pajak Penghasilan. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 19(4), 443-460.
- Sukanti, A., Grafindo, P. R., Supriyadi, B. E., & Persada, P. R. G. A. Badan Pertanahan Nasional.
- Yuesti, S. E., MM, D., Dewi, S., MSi, N. I., Pramesti, S., & MSi, I. G. A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Widayanti, W. (2017). *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian PNS Berdasarkan PP NO. 30 Tahun 2015 (Studi Empiris Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur) (Doctoral dissertation, STIESIA SURABAYA)*.